

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Anggoro, "Terkesan Proyek Mubazir" Pengoperasian Mesin Parkir Belum Efektif
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.1
Edisi	: Kamis, 7 Juni 2018

Anggoro, "Terkesan Proyek Mubazir"

Pengoperasian Mesin Parkir Belum Efektif

GANESHA, (GM).-

Sejak 14 Juli 2017, Pemerintah Kota (Pekot) Bandung resmi melakukan uji coba penggunaan parkir meter elektronik dengan menyediakan 445 mesin parkir yang tersebar di 221 titik se-Kota Bandung. Namun pengadaan mesin parkir ini dinilai masih belum efektif, bahkan dituding menjadi proyek mubazir.

Pengamat ekonomi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Anggoro Budi Nugroho mengatakan, kehadiran mesin parkir tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Di sejumlah titik alat ukur penggunaan mesin parkir tersebut dalam kondisi kurang terawat, dan ada pula yang tidak difungsikan sama sekali.

Menurut Anggoro, bila berfungsi optimal maka mesin parkir akan membantu meningkatkan pendapat-

an asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan kinerja dari 29 persen (2014-2015) menjadi 11 persen (2016-2017). Akibatnya, Kota Bandung tidak cukup mandiri dan hanya mengandalkan dana perimbangan pemerintah pusat.

"Indeks kemandirian fiskal di Kota Bandung itu hanya 13,4 persen (2015-2016). Dalam konteks ini, mesin parkir bisa membantu mendorong PAD. Lalu, *kenapa* tidak terwujud? Saya kira, permasalahannya karena sosialisasi tidak berjalan dengan baik kepada masyarakat," ungkapnya di Kampus ITB, Jln. Ganesha, Rabu (6/6).

Ia menilai, ada kegagalan dalam menggenjot PAD tambahan. Selain tidak dioptimalkan melalui sumber

Bersambung ke hlm. 15 klm. 5

Pengoperasian

Sambungan dari hlm. 1 klm. 6
daya manusia (SDM), mesin parkir juga masih kurang bersahabat dengan warga lantaran pola pembayaran non-tunai atau menggunakan kartu *e-money* hasil kerja sama dengan perbankan.

"Permasalahannya adalah, masih banyak warga yang belum memiliki kartu *e-money*. Dibandingkan mengurus pembayaran ke mesin parkir setinggi dua meter itu, warga lebih memilih membayar langsung kepada petugas parkir," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, banyak orang yang masih bingung memakai mesin parkir, karena mereka tidak tahu caranya. "Ada pula yang alasannya karena tidak punya kartu *e-money*, dan akhirnya tetap bayar ke tukang parkir," ujarnya.

Butuh evaluasi

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nenden Sukaesih menyebutkan bahwa proyek mesin parkir tidak optimal sehingga membutuhkan evaluasi mendalam karena menggunakan biaya yang besar. Namun, ia mengaku tidak bisa serta-merta menyalahkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

"Ternyata banyak kendala yang di-

hadapi, sehingga mesin parkir tidak bisa beroperasi secara maksimal. Misalnya kartu parkir *e-money* masih bermasalah, karena bank belum siap. Seharusnya ada petugas yang menunggu, tetapi personel di lapangan juga belum siap," ungkapnya.

Kendati demikian, ia menyayangkan pemanfaatan parkir meter masih menggunakan cara manual yakni juru parkir. Padahal kehadiran mesin parkir bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi parkir, dan mengoptimalkan PAD.

"Kita sudah minta supaya ada personel Dishub yang mengawasi area parkir, apalagi pendapatan dari sektor parkir sering terjadi kebocoran. Perbaiki sistem pengoperasiannya, dan perlu sosialisasi lebih masif," tuturnya.

Nenden melanjutkan, proyek parkir meter ini memiliki perencanaan buruk. "Harus diperbaiki kekurangannya, supaya ada yang beroperasi. Kita pastikan Dishub siap dengan hal-hal teknis," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya akan mendukung penuh upaya Pemkot Bandung untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir dari mesin parkir elektronik. "Kita juga akan mendatangi perbankan supaya lebih siap. Mari kita jalan bersama, sehingga tidak ada proyek yang mubazir," imbuhnya.

(wina)**